



**KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL  
MAHKAMAH KONSTITUSI**

-----

LAPORAN SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI  
PADA PEMBUKAAN BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PENANGANAN  
PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN  
WALIKOTA TAHUN 2020 BAGI KONGRES ADVOKAT INDONESIA  
BOGOR, 24 S.D. 26 NOVEMBER 2020

---

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi, Presiden DPP  
KAI, dan hadirin yang kami hormati,**

Mahkamah Konstitusi mendapatkan kewenangan tambahan yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas UU No 1/ 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota. Dalam pasal 157 (3) yaitu "Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus". Dengan adanya tambahan kewenangan ini Mahkamah Konstitusi mempunyai fungsi sebagai badan peradilan perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota pada tahap akhir.

Oleh karena itu, berbagai upaya dilakukan Mahkamah Konstitusi dalam rangka menyukseskan pelaksanaan agenda nasional ini. Salah satunya dengan menyelenggarakan bimbingan teknis Hukum Acara Mahkamah Konstitusi tentang Prosedur Beracara Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2020 kepada berbagai *stake holder* yang berkaitan langsung maupun tidak langsung.

Salah satu target grup dalam pelaksanaan Bimtek ini adalah Kongres Advokat Indonesia. Tujuan bimbingan teknis ini untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan tentang hukum acara di Mahkamah Konstitusi terkait dengan kewenangan-kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi, khususnya hukum acara terkait sengketa perselisihan hasil pemilihan kepala daerah sekaligus sosialisasi peraturan MK yang terbaru terkait perselisihan hasil pemilihan kepala daerah.

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi, Presiden DPP KAI, dan hadirin yang kami hormati,**

“Bimbingan Teknis Hukum Acara Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2020 bagi Kongres Advokat Indonesia” dilaksanakan dengan tujuan:

- a. Meningkatkan pemahaman dan menyamakan persepsi masyarakat mengenai Konstitusi, Mahkamah Konstitusi, putusan MK dan isu-isu ketatanegaraan;
- b. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang Hukum Acara Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2020.

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi, Presiden DPP KAI, dan hadirin yang kami hormati,**

Kegiatan ini akan diselenggarakan selama 3 hari 2 malam, yang dimulai pada hari ini, Selasa, 24 November 2020 sampai dengan Kamis, 26 November 2020. Kegiatan ini diikuti peserta sebanyak 400 orang yang terdaftar, dimana seluruh peserta mengikuti kegiatan secara online/daring.

Perlu kami sampaikan juga bahwa sampai dengan saat ini, alumni kegiatan Pendidikan di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi tercatat sudah sebanyak 21.842 orang yang terdiri dari berbagai latar belakang, baik melalui kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, maupun kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara.

Kami berharap, semoga kegiatan Bimtek bagi anggota KAI ini, benar-benar dapat memberikan manfaat, dan berdaya guna, termasuk dapat memperlancar pelaksanaan tugas MK.

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi, Presiden DPP KAI, dan hadirin yang kami muliakan,**

Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Yang Mulia Bapak Ketua Mahkamah Konstitusi di tengah-tengah kesibukan yang begitu padat, masih dapat menyempatkan diri hadir dalam acara pembukaan ini.

Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada Presiden DPP KAI dan jajaran yang telah bekerja sama menyelenggarakan kegiatan ini, serta seluruh peserta dan hadirin sekalian yang telah hadir untuk mengikuti kegiatan ini.

Semoga Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa, senantiasa memberikan kesehatan, kesuksesan, dan petunjuk serta perlindungan-Nya kepada Yang Mulia Bapak Ketua Mahkamah Konstitusi, serta kepada Ibu-Bapak hadirin sekalian. Tentu kami juga berharap semoga pandemi Covid-19 segera berakhir, agar kita semua dapat berjumpa kembali bertatap muka dan beraktivitas seperti sedia kala. Aamiin.

Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya bila dalam penyelenggaraan kegiatan ini masih dijumpai kekurangnyamanan dan kekurangpuasan, serta tidak sesuai dengan ekspektasi yang Ibu-Bapak harapkan. Kritik, saran dan masukan untuk perbaikan

kegiatan ini, baik dalam aspek Kurikulum, Narasumber, Metode Pembelajaran, maupun pelayanan, sangat kami harapkan.

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi, Presiden DPP KAI, dan hadirin yang kami muliakan,**

Demikian laporan kami, kami mohon perkenan Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi, Bapak **Dr. Anwar Usman, S.H., M.H.** untuk memberikan ceramah kunci sekaligus membuka kegiatan ini secara resmi.

***Pantun 1:***

*Bunga matahari tumbuh bertangkai*

*Juga bijinya dapat disemai*

*Selamat datang peserta Bimtek KAI*

*Mari sukseskan pilkada damai*

***Pantun 2:***

*Wanita cantik berpakaian merah muda*

*Menari jaipong diiringi musik perkusi*

*Jika ada sengketa hasil pilkada*

*Mari selesaikan di Mahkamah Konstitusi*

Sekian dan terima kasih. *Billahi taufiq wal hidayah  
Wassalamu'alaikum Wa Rahmatullahi Wa Barakatuh*